

PEMIKIRAN POLITIK KEBANGSAAN SAID NURSI DI TENGAH TRANSISI TURKI MENUJU REPUBLIK

Ahmad Fajar Shodik

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
fajarshodiq@gmail.com

Muhammad Faiz

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
gen_cang@yahoo.com

Hasbi Sen

Yayasan Nur Semesta Jakarta
hasbisen38@gmail.com

Abstract:

This paper seeks to examine the national political principles of Said Nursi (1877-1960) which he practiced in Turkey, namely by choosing the path of cultural political struggle. The form of struggle is through the propagation of faith and disclosure of the essence of the Koran and avoiding identity politics or the politicization of religion for temporary and sectarian political interests and at the expense of the interests of Muslims in general. This study tries to analyze the political principles of Nursi, such as the principles of tawhid, deliberation, freedom, equality, justice, and the underlying values. This study found that the national political view of Said Nursi that he implemented in the preaching of Risalah Nur, which always put forward al-'Aamal al-ijabi (positive action) and prevented destructive and negative actions must not align with the policies of the Turkish secular government at that time.

Keyword: *The National Political Principle, Said Nursi, Positive Action.*

Abstrak:

Artikel ini berusaha untuk mengkaji prinsip-prinsip politik kebangsaan Said Nursi (1877-1960 M) yang ia praktikkan di Turki, yakni dengan memilih jalan perjuangan politik secara kultural. Wujud perjuangannya adalah dengan dakwah keimanan dan pengungkapan hakikat alquran serta menghindari politik identitas atau politisasi agama demi kepentingan-kepentingan politik yang sesaat dan sektarian serta mengorbankan kepentingan umat Islam secara umum. Kajian ini mencoba menganalisa prinsip-prinsip politik Nursi seperti asas tauhid, musyawarah, kebebasan, persamaan, keadilan, serta nilai-nilai yang mendasarinya. Kajian ini mendapati bahwa pandangan politik kebangsaan Said Nursi ia implementasikan dalam dakwah Risalah Nur yang selalu mengedepankan *al-'amal al-ijabi* (aksi positif) dan menghindari aksi destruktif dan negatif mesti tidak sehaluan dengan kebijakan pemerintah sekular Turki ketika itu.

Kata Kunci: *Prinsip Politik Kebangsaan, Said Nursi, Aksi Positif.*

Pendahuluan

Said Nursi (1877-1960 M) yang dikenal dengan julukan *Badiuzzaman* merupakan tokoh penting pada era transisi keruntuhan khilafah Utsmaniyah di Turki dan berdirinya Republik Turki.¹ Dengan kapasitas keilmuan (*alim*) yang memadai, ahli ibadah yang tekun (*abid*) serta pemikir (*mufakkir*) untuk kemajuan bangsanya dan umat Islam secara global, beberapa kalangan memasukkan Said Nursi sebagai sosok pembaharu (*mujaddid*) abad ke-21.

Karya fenomenalnya “Risalah Nur” yang ditulis dalam kurun yang cukup panjang, selama 25 tahun, dalam masa yang amat sulit (pengasingan dan penjara) menjelang Perang Dunia I dan masa-masa

¹ Sukran Vahide, *Biografi Intelektual Bediuzzaman Said Nursi* (Jakarta: Anatolia, 2007), 3.

genting masa transisi Turki yang dipelopori oleh kalangan Nasionalis liberal-sekuler pimpinan Mustofa Kamal Atatürk, mampu dia selesaikan hingga jilid ke-9 dan terdiri lebih dari 6000 halaman.

Secara garis besar isi kandungan karya-karya Nursi berputar mengenai pembahasan tentang keimanan, hakikat alquran, tauhid, kenabian dan risalah- risalahnya (hadis) serta hari akhir. Metode yang kerap diterapkan dalam penulisan karya Nursi adalah dengan pendekatan kontemplatif, menggunakan permisalan (*amtsal*), dialogis dan mengajak pembaca kepada pendayagunaan seluruh potensi indrawi manusiis.²

Setelah meninggalnya Said Nursi tahun 1960, karyanya Risalah Nur kian tersebar ke segala penjuru dunia hingga diterjemahkan ke lebih dari 70 bahasa dunia saat ini.³ Begitupun jaringan “murid-murid” Risalah Nur (*Thullabunnur*) yang intens membaca karya Nursi ini dan terus mengkaji pemikiran-pemikirannya turut mempengaruhi tersebarnya karya Nursi ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia.

Di antara spektrum pemikiran Nursi yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah pandangan politik Nursi yang mewarnai karakter dan warna dakwah Islam di Turki. Dinamika politik dan sosial Turki yang bergejolak ketika itu diwarnai oleh pandangan kebangsaan dari Nursi dan jaringan gerakan Nur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip politik kebangsaan Said Nursi yang ia praktikkan di Turki, yakni

² Ihsan Qasim al-Shalihi, *Nadhrāh Ammah an-Hayat Badi al-Zaman Said al-Nursi* (Kairo: Sozler Publication, 2010), 112.

³ Hasbi Sen, “Wawancara,” 15 Agustus 2019.

dengan memilih jalan perjuangan politik secara kultural. Wujud perjuangannya adalah dengan dakwah keimanan dan pengungkapan hakikat alquran serta menghindari politik identitas atau politisasi agama demi kepentingan-kepentingan politik yang sesaat dan sektarian serta mengorbankan kepentingan umat Islam secara umum.

Penelitian tentang pandangan politik kebangsaan Said Nursi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khazanah politik Islam yang penting dan berguna bagi perjalanan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang majemuk dan multikultural. Lebih lanjut hasil kajian mengenai prinsip-prinsip pemikiran politik Said Nursi dapat menginspirasi banyak kalangan untuk mengukuhkan politik Islam (kebangsaan) yang humanis di Indonesia dan dapat meminimalisir gejala gerakan politisasi agama dan geliat politik identitas yang masih kuat dan masif.

Beberapa penulis dan peneliti telah mengkaji tentang pemikiran Said Nursi dari berbagai sudut. Mengenai pemikiran politiknya, terdapat beberapa penulis yang telah mengkaji dalam bentuk disertasi, buku dan artikel. Penelitian yang dilakukan oleh M. Hakan Yavuz, dalam disertasinnya berjudul *Islamic Political Identity in Turkey* (Identitas Politik Islam di Turki) pada Universitas Oxford di Amerika Serikat memberikan uraian tentang Said Nursi. Yavuz mengemukakan ide-ide Said Nursi dan penengaruhnya dalam perkembangan politik di Turki. Menurutnya, Gerakan Nur menjadi komunitas sosio-politik yang paling efektif dan kuat pada era Turki kontemporer. Dalam konteks ini, karya-karya Said Nursi menjadi dasar untuk “gerakan iman” ini.

Karya Nursi menandai wacana ilmiah politik Islam, memberikan ide-ide orisinal untuk menghadapi problem politik dan sosio-kultural. Dengan meneliti gerakan ini, bisa dipahami dinamika agama dan negara di satu sisi, modernitas dan identitas di sisi lain. Dinamika gerakan ini sebagai gerakan sosial berakar pada jaringan media, pendidikan, bisnis dan *publishing* mereka.

Ada beberapa makalah yang disajikan pada simposium internasional tentang pemikiran Said Nursi yang dilaksanakan di Istanbul, Turki. Sebagian makalah membahas pemikiran politik Said Nursi. Antara lain, Prof. Dr Ahmet Davudoglu menulis makalah berjudul *Bediuzzaman and The Politics The 20th Century Islamic World* (Bediuzzaman dan politik Dunia Islam pada abad ke- 20). Ia mengungkapkan bahwa ada hubungan erat perodesasi kehidupan Nursi dengan perkembangan pada dunia Islam. Periode pertama, adalah dari awal abad ke-20 sampai dengan runtuhnya kekhalifahan pada tahun 1924. Menurutnya, periode ini bertetapan dengan periode *Said Qadim* pada kehidupan Nursi. Pada periode ini, Nursi telah aktif mencari solusi untuk problem-problem sosial kebangsaan. Ia juga mencurahkan perhatiannya pada masalah-masalah yang terkait dengan dunia Islam secara global, maupun lebih khususnya di wilayah Turki Utsmani.

Periode kedua adalah dari runtuhnya kekhalifahan sampai dengan Perang Dunia II. Pada periode ini, dunia Islam kehilangan resistensi terhadap dunia imperialis dan banyak perubahan-perubahan penting dalam kehidupan sosial dalam dunia Islam. Dalam kondisi ini, Nursi berusaha memperbaharui iman individu untuk

membentuk komunitas Islami. Sedangkan pada periode ketiga, negara-negara muslim mulai bangkit dari penjajahan dan mendirikan negara secara mandiri. Walaupun Nursi melepaskan diri dari dunia politik (praktis), namun dia tetap menyuarakan pandangan-pandangan konstruktifnya seputar politik.

Selain itu, Dr. Huseyin Celik menulis makalah berjudul *Republicanism and Democracy according to Bediuzzaman* (Sistem Republik dan Demokrasi menurut Bediuzzaman). Di dalam makalahnya, Celik mengemukakan sistem Republik dan demokrasi dari sudut pandang Nursi. Dia menyimpulkan bahwa Nursi adalah seorang ulama yang memiliki cita-cita bahwa perlu menerapkan konstitusionalisme saat sistem kesultanan berlaku pada kekhalifahan Utsmani. Nursi juga berbicara tentang sistem republik secara eksplisit dalam periode konstitusional. Ia menekankan bahwa sistem pemerintahan harus mengandung prinsip-prinsip demokrasi baik pada periode konstitusional maupun periode pemerintahan Turki.

Prof. Dr. Mim Kemal Oke menulis makalah berjudul *The Key of the ideal of Republicanism in the Light of Bediuzzaman's Social and Political Views*. Di dalam makalahnya, Kemal Oke menjelaskan pemikiran Nursi tentang sistem Republik dan pemerintahan konstitusional. Dia mengungkapkan bahwa Nursi berpendapat akan konsep konstitusionalisme yang ada pada Islam. Dengan pandangan ini, ia menggambarkan sebuah sistem politik yang bersupremasi hukum, adil dan bebas. Sistem tersebut ia contohkan dengan pemerintahan pada masa Khulafa al-Rasyidun sebagai contoh sistem republik yang ideal.

Meskipun telah memberikan kontribusi penting terhadap kajian tentang pemikiran politik Said Nursi, buku dan makalah di atas belum membahas prinsip-prinsip politik Said Nursi secara komprehensif. Misalnya, Huseyin Celik ketika membahas sistem republik dan demokrasi menurut Said Nursi, Ia hanya meneliti pemikiran politik Nursi dari segi sistem pemerintahan, sedang aspek lain tidak dibahas. Oleh karena itu, kajian ini mencoba menganalisa prinsip-prinsip politik Nursi seperti asas tauhid, musyawarah, kebebasan, persamaan, keadilan, serta nilai-nilai yang mendasarinya.

Dalam kajian ini metode penganalisan data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dijalankan dengan menyaring tema-tema politik dan kebangsaan yang dibahas Nursi di dalam karya-karyanya. Kemudian juga diperkaya dengan tulisan para pengkaji dan peneliti tentang Said Nursi dalam kaitannya dengan pandangan politik Nursi.

Sumber primer penelitian ini adalah karya-karya Said Nursi yang terangkum dalam karya *masterpiece* “Risalah Nur” serta hasil wawancara dengan pegiat karya dan pemikiran Nursi (*Thullabunnur* Indonesia) yang mempunyai sekretariat di Ciputat, Jakarta.

Sedangkan sumber sekunder didapatkan dari buku, makalah, prosiding dan jurnal yang membahas tentang Said Nursi, karyanya Risalah Nur dan hubungannya dengan pandangan politiknya. Sumber rujukan penting lainnya juga berasal dari buku-buku dan makalah yang membicarakan tentang kondisi sosial-politik yang berlangsung di Turki.

Pemikiran Politik Kebangsaan Said Nursi

Adapun yang melandasi pemikiran politik Said Nursi adalah enam prinsip dasar yang meliputi tauhid, musyawarah, kebebasan, keadilan, persamaan dan nasionalisme. Tauhid sebagai salah satu prinsip dasar dalam pemikiran politik Nursi ini sebagaimana Imam al-Ghazali dan para tokoh pendahulunya juga berpendapat yang senada, merupakan dasar pemikiran politik dalam Islam. Menurut Nursi alam semesta ini merupakan sebuah sistem mulai dari partikel sampai galaksi. Oleh karena itu, sistem ini dengan semua bagiannya sesungguhnya merupakan bahan dalam mencapai sistem sosial dan politik untuk manusia.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa negara juga merupakan wujud suatu sistem yang di dalamnya harus ada prinsip tauhid agar negara dapat berjalan teratur dan sistematis, sebagaimana alam raya ini dapat bergerak dengan begitu teratur sebab percikan tauhid.

Nursi menguraikan bukti-bukti dari alam semesta untuk mencapai tauhid haqiqi. Menurutnya, keteraturan, keseimbangan, dan keindahan yang pada alam semesta menunjukkan keberadaan Allah SWT. Bagi Nursi adanya 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah SWT, akhirat, malaikat, para nabi, kitab-kitab samawi dan taqdir merupakan pondasi kokoh.

Menurutnya, perubahan yang bersifat baik dalam sebuah masyarakat dapat dimulai dari individu ke komunitas melalui tauhid haqiqi ini. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tauhid adalah

pondasi sistem politik Islam untuk membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang kosmopolit.

Masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat sejatinya dapat diatasi dengan pencapaian pada tingkat *iman haqiqi*. Karena, rekonstruksi dalam watak masyarakat dengan *iman haqiqi* berpengaruh pada sektor ekonomi, politik dan kehidupan sosial. Dengan demikian, masyarakat akan maju dengan mengimplementasikan nilai-nilai Islam.

Terjadinya banyak penyelewangan oleh para pemimpin dan pejabat publik dalam dunia politik pada masa kini adalah sebuah kerisauan kebangsaan. Prinsip tauhid memberikan kesadaran kepada para pemimpin bahwa semua kebijakan yang mereka jalankan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Maka, dengan kesadaran tauhid para pemimpin dan pejabat tidak menindas hak rakyat dan menjadi berhati-hati dalam setiap keputusannya.

Para pejabat dan penguasa cenderung memiliki otoritas yang tidak bisa ditentang, oleh karena itu banyak manusia yang begitu saja menyerah dan tunduk kepada mereka tanpa daya pikir dan keberanian untuk mengkritik. Dengan mencapai tingkat *iman tahqiqi* yang disebutkan oleh Nursi di atas, masyarakat bisa mengkritik kebijakan pemimpin demi kemaslahatan umat. Karena manusia merupakan hamba Allah semata dan tidak merendahkan diri kepada siapapun.

Adapun dasar politik kebangsaan yang kedua menurut Nursi ialah semangat bermusyawarah. Nursi memahami konsep **musyawarah** tidak hanya dari sudut pandang ekonomi dan sosial. Ia percaya

bahwa musyawarah merupakan mekanisme untuk mengambil keputusan yang benar untuk urusan Islam. Menurutnya, konsep musyawarah adalah berdasarkan hakikat, argumentasi, dan berpikir rasional. Ia juga percaya bahwa melalui proses musyawarah umat Islam bisa menghadapi dan menjawab tantangan peradaban modern.

Menurut Nursi untuk mengaktualisasikan musyawarah harus diambil contoh zaman Rasulullah di mana mekanisme membuat keputusan yang diterima berdasarkan pada rasionalitas manusia serta musyawarah yang didukung oleh wahyu, agar tidak ada keraguan dan kesalahan.

Bagi Nursi, musyawarah tidak hanya terbatas antara individu, tetapi juga perlu dilaksanakan antara kelompok-kelompok dan bahkan antara negara dan benua. Dengan sistem musyawarah itu, umat Islam bisa menghadapi tantangan zaman yang ril dihadapi.

Dalam konteks politik modern sekarang, prinsip musyawarah dapat dipraktikkan untuk menentang elitisme yang menganggap bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menjadi pemimpin. Melalui prinsip musyawarah (atau pemilihan) masyarakat berhak memilih pemimpinnya sendiri. Musyawarah juga mencegah penyelewengan negara ke arah sistem otoriter, despotisme dan berbagai sistem lain yang membunuh hak-hak politik masyarakat. Sebab dalam musyawarah, masyarakat dapat berpartisipasi secara fair dalam dunia politik secara khusus.

Prinsip musyawarah juga dapat mejadi alat untuk mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintahan. Karena, melalui wakil rakyat yang duduk di majlis, masyarakat bisa mengontrol kebijakan

pemerintah dan mengarahkannya sesuai kebutuhan masyarakat yang tak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Prinsip dasar yang ketiga adalah **kebebasan**. Bagi Nursi kebebasan sangat penting bahkan ia mengatakan “saya bisa hidup tanpa roti, tetapi tidak bisa hidup tanpa kebebasan”. Menurut Nursi kebebasan haruslah di atas prinsip, karena itu tidak ada orang yang boleh menghakimi orang lain, semua harus di atas peraturan hukum dan norma-norma masyarakat yang disepakati dan tidak bertentangan dengan norma agama. Semua hak orang mestilah terjamin, semua orang punya kebebasan dalam tindakan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Mungkin ada orang yang menafsirkan kebebasan sebagai kebebasan mutlak dan bertindak tanpa batas, tetapi berbeda dalam pandangan Nursi. Menurut Nursi, tidak ada kebebasan yang mutlak dan tanpa batas. Ia mengatakan kebebasan harus diikat dengan ajaran Islam. Kalau tidak maka kebebasan akan liar mengikuti hawa nafsu dan mendekati kebebasan hewani dalam arti kebebasan yang tanpa batas.

Nursi membuat relasi secara logis antara iman, kebebasan dan hukum. Menurutnya, orang yang menjadi pelayan Sultan alam semesta dengan ikatan iman, kemuliaan dan *izzah* iman orang tersebut akan menghindarkan untuk merendahkan dirinya terhadap orang lain dan menolak despotisme serta kezaliman. Hingga kasih sayang orang tersebut tidak meremehkan hak dan kebebasan orang lain. Maka kekuatan iman akan menjunjung tinggi kebebasan secara proporsional sebagaimana diteladankan oleh Nabi Muhammad Saw.

Menurut Nursi kebebasan merupakan satu nilai yang penting untuk perubahan sosial, baik ditingkat masyarakat lokal maupun umat secara global. Nursi berpandangan “Sesungguhnya pintu pertama untuk masuk kemajuan Asia dan umat Islam mendatang yaitu *masyrutiiyyet-i masyrua* (konstitusi yang sesuai dengan syariah) serta kebebasan yang sesuai dengan syariah”.

Pada sisi yang lain, Nursi mengakui kebebasan berfikir dan beragama, ia mengatakan sistem republik menjamin kebebasan untuk berfikir dan beragama. Tidak seorangpun bisa dihukum dengan pendapatnya yang ia terima dengan hati nuraninya asalkan tidak mengganggu keamanan dan peraturan publik (menimbulkan *chaos* di masyarakat).

Dari ungkapan di atas dapat dipahami bahwa orang atau sebuah organisasi boleh berposisi dengan pemerintahan sebagai kebebasan dasarnya, tetapi tidak punya hak untuk merusak keamanan masyarakat. Dari definisi Nursi tentang kebebasan juga dapat dipahami bahwa kebebasan harus ditempatkan di bawah supremasi hukum. Dengan supremasi hukum hak individu dijamin oleh negara. Rakyat memiliki kebebasan bertindak selama tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum dan Syariah.

Nursi tidak membatasi konsep kebebasannya dengan mengganggu dan menzalimi orang lain, bahkan manusia tidak berhak mengganggu dan merugikan dirinya, apalagi terhadap orang lain. Walaupun manusia memiliki kebebasan, tetapi dia bertanggung jawab atas tindakannya terhadap masyarakat dan Allah SWT. Oleh karena itu, tindakan manusia harus sesuai dengan perintah Sang

Pencipta melalui aturan-aturan-Nya. Jika manusia mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak memiliki kebebasan yang hakiki melainkan menjadi hamba nafsu.

Prinsip kebebasan dapat mendorong kepada masyarakat untuk mencapai kemajuan. Karena masing-masing individu mempunyai pendapat dan pandangan terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat kemudian dapat disalurkan melalui Lembaga Sosial Masyarakat (NGO), serta institusi dan lembaga-lembaga formal politik lainnya.

Dalam konteks politik modern sekarang, kebebasan berfikir dan berpendapat merupakan alat bagi individu, masyarakat dan organisasi untuk memonitor kebijakan pemerintah, menyampaikan kritik membangun atas kebijakan-kebijakan tersebut untuk mengarahkan ke hal yang lebih baik dan kepentingan masyarakat sendiri.

Pembatasan kebebasan manusia dengan peraturan hukum dan nilai-nilai Islam sejatinya dapat menjamin keharmonisan masyarakat di mana individu tidak mengambil hak orang lain, ia bebas bertindak sesuai dengan batas-batas hukum undang-undang positif dan tidak bertentangan dengan syariaah Islam.

Prinsip politik kebangsaan Nursi yang keempat adalah **keadilan**. Keadilan absolut yang diungkapkan oleh Nursi tidak mengizinkan diskriminasi terhadap hak individu yang menjadi korban hak mayoritas umat manusia. Karena keadilan absolut memandang hak komunitas dan hak individu adalah sama. Selama

individu tidak mengorbankan haknya, hak individu tersebut tidak dapat dikorbankan demi masyarakat, negara, bahkan umat manusia.

Keadilan yang digambarkan oleh Nursi, memang indah dan sempurna. Tetapi memberlakukan keadilan absolut dalam masyarakat modern yang serba kompleks ini tentu sangat sulit. Karena sebuah pemerintah dapat mengambil satu kebijakan yang hampir mustahil dapat memuaskan semua pihak, sangat mungkin ada ada pihak yang dirugikan. Kalau keadilan absolut ini tidak bisa dipraktikkan, setidaknya diterapkan keadilan relatif, tetapi pemerintah harus berusaha untuk meminimalisir dampak-dampak negatif dari penerapan keadilan relatif ini.

Pada era modern sekarang, sebuah pemerintah harus berlaku adil terhadap masyarakatnya dan memberikan hak kepada yang berhak melalui prinsip keadilan yang jelas. Pemerintah juga harus memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan agama, ras, etnis serta status sosial dan lain-lain.

Prinsip pemikiran politik kebangsaan Nursi selanjutnya adalah nilai **persamaan**. Beberapa refleksi pemikiran Nursi tentang persamaan ini terlihat dalam beberapa poin. *Pertama*, tidak ada persamaan mutlak. Karena pada dasarnya kemampuan, potensi dan perasaan manusia tidak sama. Hal ini tidak berarti semua kesempatan diambil oleh orang-orang tertentu atau orang-orang yang memegang kekuasaan yang terbatas. Dengan prinsip persamaan orang akan mendapat penghargaan sesuai dengan kemampuan, latar belakang pendidikan dan etos kerjanya.

Kedua, persamaan di depan hukum berlaku untuk semua manusia tanpa memandang warna kulit, jenis kelamin, kedudukan, kekayaan dan agama. Sehingga seorang pengemis dan seorang presiden memiliki hak yang sama di depan hukum. Hal ini didukung oleh banyak kasus dalam lintasan sejarah Islam.

Ketiga, hak, keamanan, dan harta kaum minoritas terjamin selama mereka mematuhi hukum yang ada. Mereka bebas melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Penerapan hukum terhadap kaum minoritas dalam sejarah Islam menunjukkan bahwa pada umumnya kaum minoritas diberlakukan sama dengan kaum muslimin. Jadi Islam telah memberikan hak mendasar kepada kaum minoritas di depan hukum.

Dalam konteks politik modern, persamaan di depan hukum antara muslim dan non-muslim sangat penting dalam kehidupan sosial khususnya masyarakat plural seperti di Turki dan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus juga menjamin hak kelompok minoritas dalam hal beragama, agar bermuamalah secara leluasa dengan hak dasar yang sama. Sehingga masyarakat muslim dan non-muslim pun dapat hidup dalam keadaan nyaman dan harmonis di bawah keanekaragaman.

Islam pada prinsipnya tidak membedakan umat manusia atas jenis kelamin, etnis, warna kulit, keadaan ekonomi maupun status sosial. Dengan prinsip persamaan ini, pemerintah dapat bertindak secara adil dan menerima persamaan di depan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan perbedaan fitriyah. Dengan penerapan

prinsip persamaan inilah, masyarakat dapat tenang dan tenteram dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial.

Landasan pemikiran politik Said Nursi yang keenam adalah nilai **nasionalisme**. Menurut Said Nursi nasionalisme terbagi menjadi dua macam; *Pertama*, adalah nasionalisme negatif, yang jahat, berbahaya dan dibesarkan dengan keharusan melenyapkan pihak lain dan rentan permusuhan. Nasionalisme semacam ini adalah penyebab timbulnya rasa saling membenci dan perselisihan, sehingga dicela dan ditolak baik oleh al-Quran maupun risalah kenabian. Para pendukung nasionalisme negatif pun menyebabkan banyak malapetaka sepanjang sejarah bagi persatuan umat Islam.

Kedua adalah nasionalisme positif yang muncul dari nilai-nilai hakiki kehidupan sosial. Nasionalisme semacam ini menimbulkan sikap saling tolong menolong dan solidaritas, menghasilkan kekuatan yang menguntungkan dan membuat ukhuwwah Islamiyah tumbuh semakin kuat.

Semangat nasionalisme positif ini harus digunakan untuk mengabdikan pada Islam dan sebagai benteng yang kokoh untuk melindungi Islam; nasionalisme positif seperti ini tidak boleh menggantikan Islam. Karena persaudaraan yang dikehendaki dan dibangun oleh Islam adalah bermacam-macam dan sangat berharga baik dalam kehidupan ini, di alam barzah maupun di akhirat kelak. Maka betapapun kuatnya persaudaraan kaum nasionalis, itu hanyalah salah satu aspek ukhuwwah Islamiyah saja menurut Nursi.

Dalam pandangan Nursi Islam dan nasionalisme tidak bisa dipisahkan. Karena Islam memberikan semangat bagi umat Islam

untuk menjaga persatuannya. Terlebih bagi bangsa Turki, agama dan nasionalisme begitu penting, karena identitas Turki telah melebur dalam identitas Islam sejak berabad-abad dalam sejarahnya.

Nursi melihat nasionalisme merupakan sebuah keniscayaan pada abad ke-20, sehingga berusaha menjelaskan nasionalisme dalam perspektif Islam sesuai pemahaman yang dimilikinya. Nursi mengemukakan konsep nasionalisme positif yang merangkul semua umat Islam dan tidak bermusuhan dengan pihak lain. Nasionalisme positif tidak mengingkari keberadaan bangsa lain. Bahkan ia mengakui semua umat Islam sebagai saudara tanpa melihat perbedaan ras. Penggunaan nasionalisme positif yang berdasarkan Islam tidak berarti menghancurkan atau melenyapkan agama lain.

Sedangkan nasionalisme negatif yang digambarkan oleh Nursi menyebabkan permusuhan dan perpecahan antara umat Islam. Karena nasionalisme yang salah ini ingin melenyapkan bangsa lain dan menyebabkan permusuhan terhadap pihak lain. Nasionalisme negatif yang berdasarkan ras mengakibatkan terjadinya malapetaka bagi umat manusia seperti pecahnya Perang Dunia I.

Selain itu dunia Barat menggunakan nasionalisme negatif ini sebagai alat untuk memecah-belah dan melenyapkan umat Islam. Oleh karena itulah Nursi mencela nasionalisme negatif berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa Islam melarang *Ashabiyyah* (kesukuan) sebagai pandangan jahiliyah.

Terkait era kini nasionalisme Islam atau nasionalisme positif amat penting bagi umat Islam pada masa modern sekarang.

Walaupun tidak bisa mempersatukan umat Islam di bawah satu payung atau satu negara, namun organisasi-organisasi Islam secara internasional terutama Organisasi Konferensi Islam (OKI) menjadi media untuk solidaritas umat Islam.

Hal ini dapat terlihat pada perkembangan OKI yang memainkan peran dalam bidang budaya, ekonomi, sosial dan sebagainya agar memberikan kontribusi mengurai pelbagai problematika umat Islam. Meski tampaknya usaha OKI belum maksimal sebagaimana yang diharapkan, tetapi paling tidak mendekati harapan-harapan bagi umat Islam.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pemikiran politik Nursi tidak ditemukan adanya tujuan untuk mendirikan sebuah negara Islam. Namun, Nursi lebih menguraikan prinsip-prinsip dasar seperti musyawarah dan keadilan agar pengelolaan pemerintahan sesuai dengan ajaran Islam.

Memang dalam Islam tidak ada *nash* yang memerintahkan untuk mendirikan sebuah negara Islam. Tetapi ini tidak berarti Islam sama sekali tidak ada hubungannya dengan politik. Karena, ajaran Islam mempunyai seperangkat nilai dan prinsip untuk kehidupan sosial termasuk kehidupan bernegara dan politik.

Ketika Nursi mengutarakan prinsip-prinsip universal tentang pemikiran politik pada masanya, bersamaan pula dengan terjadinya perubahan-perubahan besar dalam bidang ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan dan politik pada abad ke-20. Hal ini juga berpengaruh terhadap dunia pemikiran global para tokoh intelektual di dunia Islam, termasuk pemikiran Said Nursi.

Pada waktu itu prinsip-prinsip seperti kebebasan, keadilan dan musyawarah diungkapkan dengan gaya yang jauh dari makna sebenarnya. Nursi telah berusaha menafsirkan prinsip-prinsip di atas sesuai dengan keyakinan dan pemahaman masyarakat Islam, khususnya bangsa Turki pada ketika itu.

Dalam penjelasannya ia menggunakan Islam sebagai referensi utama. Dalam perjuangan Nursi dapat terlihat bahwa ia berusaha membenahi individu dan masyarakat secara kultural dengan pengajian dan sebaran ilmunya daripada perubahan struktural dalam politik secara radikal.

Simpulan

Dari prinsip-prinsip politik yang diuraikan oleh Nursi dapat dipahami bahwa jika sebuah pemerintahan telah memenuhi syarat-syarat seperti:

1. Pemerintah yang terpilih berdasarkan kebebasan kehendak masyarakat;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dengan musyawarah;
3. Adanya supremasi hukum, sehingga penegak hukum tidak sewenang-wenang;
4. Dalam penerapan hukum diutamakan keadilan

Maka dapat dikatakan sebagai sebuah pemerintahan Islami walaupun bentuk pemerintahannya bercorak beda. Karena Nursi menganggap yang paling penting adalah penerapan prinsip-prinsip dalam pemerintahan bukan bentuk formal sebuah negara. Namun begitu setelah pendirian Republik Turki, Nursi turut mengkritik pemerintahan yang otoriter dan

Ahmad Fajar Shodik, Muhammad Faiz, Hasbi Sen, Pemikiran Politik...
menjalankan despotisme karena bertentangan dengan pandangan politik
nya yang bernapaskan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arake, Lukman. "Pendekatan Hukum Islam terhadap Jihad dan Terorisme." *Ulumuna*, Vol. 16 No. 1 (Juni 2012).
- Al-Shalihi, Ihsan Qasim. *Nadzrah Ammah An Hayat Badi' Al- Zaman Said Al-Nursi*. Kairo: Sozler Publication, 2010.
- Vahide, Sukran. *Biografi Intelektual Bediuzzaman Said Nursi: Transformasi Dinasti Usmani Menjadi Republik Turki*. Jakarta: Anatolia, 2007
- _____. *Biografi Intelektual Bediuzzaman Said Nursi*. Jakarta: Anatolia Prenada, 2007.
- Nursi, Said. *Sirah Dzatiyah*, diterjemahkan oleh Ihsan Qasim al-Sahalihi. Kairo: Syarikat Sozler, 2011.
- _____. *Shayqal al-Islam*, diterjemahkan oleh Ihsan Qasim al-Sahalihi. Kairo: Syarikat Sozler, 2011.
- _____. *Al-Malahiq*, diterjemahkan oleh Ihsan Qasim al-Sahalihi. Kairo: Syarikat Sozler, 2011.
- Yavuz, Hakan. *Islamic Political Identity in Turkey*. New York: Oxford University Press, 2003.